

**International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
and Sustainable Development Foundation (SDF)**

Pernyataan IYAFA Asia

Workshop Asia: IYAFA 2022-Merayakan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

8 Mei 2022

Kami, perwakilan dari asosiasi pekerja perikanan skala kecil, koperasi, serikat pekerja, organisasi berbasis masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dari sebelas negara Asia Selatan dan Tenggara¹ yang berkontribusi sekitar 30% dari produksi perikanan tangkap global (laut dan air tawar) dan hampir 45% dari populasi nelayan dunia;

Setelah bertemu di Bangkok, dengan mengikut semua protokol COVID-19, selama perayaan Tahun Perikanan dan Budidaya Skala Kecil Internasional (IYAFA), sebagaimana dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 72/72, menghargai penekanannya pada partisipasi perikanan skala kecil sebagai aktor dalam pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan perikanan dan Pedoman Sukarela untuk Mengamankan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan (Pedoman SSF);

Menjunjung tinggi prinsip kerja sama regional dan internasional serta kolaborasi di antara semua bentuk pekerja perikanan skala kecil dan organisasi pendukung, ditambah konsultasi dan partisipasi dalam semua kegiatan pembangunan yang mempengaruhi daratan atau badan air yang menjadi kepentingan komunitas nelayan skala kecil;

Merayakan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pekerja perikanan kelautan dan air tawar;

Menyadari relevansi berkelanjutan perikanan skala kecil, kelautan dan air tawar, dalam konteks ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan dan warisan budaya;

Sadar akan peran penting yang dilakukan perempuan dalam pembangunan inklusif perikanan skala kecil;

Prihatin dengan hilangnya hak tenurial tradisional/adat dari skala kecil dan Masyarakat Adat atas badan air dan tanah untuk hidup, mengoperasikan alat tangkap, dan untuk mengolah dan memasarkan ikan (terutama bagi perempuan), termasuk pengeringan ikan. Kerugian tersebut terjadi akibat: reklamasi/konversi untuk kegiatan pariwisata; kawasan ekonomi khusus; proyek permukiman mewah; sungai atau kanal yang dapat dilintasi kapal-kapal besar; budidaya pantai, pembangkit listrik tenaga angin; pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan; pemukiman wajib bagi keluarga nelayan; dan pemiskinan nelayan untuk menjadi buruh upahan atau buruh kontrak di tambak ikan dan bentuk-bentuk marginalisasi lainnya;

¹ Bangladesh, Cambodia, Myanmar, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam.

Lebih lanjut, kami, prihatin tentang dampak buruk dari kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, peristiwa cuaca ekstrim dan pandemi;

Sadar tentang bagaimana konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya air dan komponen ekosistem laut, pesisir dan darat merupakan hal mendasar untuk mendapatkan semua bentuk hak tenurial; dan bagaimana hak tenurial dapat melindungi akses bagi perempuan dan laki-laki ke sumber daya dan pasar mereka (SDG 14b);

Memperhatikan perempuan yang menghadapi berbagai tantangan di kawasan Asia; beberapa tantangan ini berasal dari konteks nasional yang berbeda, diakui bahwa ada banyak tantangan umum. Perempuan seringkali menghadapi beban empat kali lipat dimana mereka mencoba menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga (mengurus keluarga dan anak-anak mereka); terlibat dalam kegiatan di sepanjang rantai nilai perikanan; berpartisipasi dalam organisasi dan mobilisasi masyarakat; dan menghadapi tindakan diskriminatif; dan

Lebih lanjut prihatin tentang berbagai dampak COVID-19, pembatasan dan krisis ekonomi pada komunitas nelayan, ditambah kebutuhan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan menyediakan layanan sosial yang efektif untuk semua orang di sepanjang rantai nilai perikanan;

Menyerukan kepada pemerintah Asia, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk:

Mengatasi ancaman dari bendungan hulu ke sungai nasional dan lintas batas yang mengurangi aliran air dan ketersediaan ikan di daerah penangkapan ikan hilir terhadap nelayan skala kecil; dalam konteks ini, memberikan kompensasi yang memadai kepada nelayan skala kecil atas kerusakan yang diderita akibat degradasi ekosistem;

Mengadopsi alokasi air yang adil dan merata untuk memungkinkan nelayan skala kecil dan pekerja perikanan mempraktekkan penangkapan ikan mereka untuk kegiatan mata pencaharian sepanjang tahun, dengan memperhatikan berbagai penggunaan sumber daya air tawar;

Mengalokasikan dan meningkatkan kesadaran tentang hak tenurial atas tanah dan badan air, dan selanjutnya memperkuat kapasitas masyarakat lokal, termasuk perempuan, untuk menikmati hak-hak ini tanpa hambatan, terutama dalam konteks pengakuan hak pengelolaan bersama dan pengelolaan berbasis masyarakat di bawah undang-undang nasional di daerah penangkapan ikan pedalaman dan pesisir;

Melindungi hak tenurial tradisional/adat, untuk memulihkan hak-hak ini jika ditolak, dan untuk memberikan pemulihan dan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak, jika hak-hak ini dibatalkan setelah konsultasi;

Mempromosikan keamanan tenurial yang lebih besar dengan berkonsultasi dengan komunitas nelayan; dalam konteks ini pemerintah harus membuat ketentuan yang memadai untuk memperluas dukungan anggaran untuk meningkatkan keamanan kepemilikan dalam kaitannya dengan tanah dan badan air (laut dan air tawar);

Memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam tata kelola perikanan dan proses pengelolaan bersama, sehingga keprihatinan mereka didengar, dan agar

mereka dapat berkontribusi langsung dalam mengembangkan program untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi;

Mengakui tenaga kerja perempuan atas kontribusinya yang penting bagi sektor perikanan. Pekerjaan perempuan seringkali tidak terlihat, dan dilihat sebagai tugas keluarga tanpa kompensasi ekonomi. Namun, pekerjaan rumah tangga, perawatan, sebelum dan setelah panen, perempuan sangat penting bagi berfungsinya sektor perikanan;

Memfasilitasi organisasi perempuan dan ruang untuk membangun jaringan di mana perempuan dapat mendiskusikan tantangan bersama, saling mendukung, dan mengembangkan cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi;

Melakukan pengolahan limbah industri, serta budidaya dan limbah rumah tangga sebelum dibuang ke badan air laut atau perairan pedalaman;

Menyediakan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan medis, termasuk untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh paparan polusi industri di wilayah pesisir;

Mengembangkan dan melembagakan langkah-langkah hukum untuk melarang atau menghapus secara bertahap penggunaan alat tangkap dan praktik yang merusak yang berdampak negatif pada kesetaraan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perairan dan keanekaragaman hayati. Langkah-langkah harus dilakukan untuk menghapus pukut-hela (pukat) dasar dari perairan pedalaman, kepulauan, perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif, dalam jangka waktu yang wajar;

Meningkatkan akses ke sumber daya perikanan yang berkelanjutan bagi nelayan skala kecil yang menggunakan alat dan praktik penangkapan ikan yang tidak merusak dan bertanggung jawab, termasuk melalui penyediaan bahan bakar yang terjangkau untuk meringankan kesulitan;

Menyediakan peluang mata pencaharian alternatif bagi nelayan skala kecil dan pekerja perikanan selama musim paceklik;

Mencegah penangkapan dan penahanan dan mempromosikan perlakuan manusiawi terhadap nelayan skala kecil karena secara tidak sengaja menyeberang ke perairan di bawah yurisdiksi Negara lain; dalam konteks ini, membuat mekanisme antar pemerintah untuk menangani isu-isu yang terkait dengan pergerakan kapal penangkap ikan lintas batas;

Menyediakan skema asuransi kecelakaan, kapal dan peralatan, jiwa, bencana alam dan pandemi untuk semua nelayan melalui subsidi pemerintah dan membuat ketentuan untuk tunjangan musim paceklik, terlepas dari status keanggotaan mereka dalam koperasi/asosiasi perikanan dan memastikan akses tepat waktu ke manfaat dari skema ini selama kecelakaan, sakit atau mati, atau ketika ada kehilangan sebagian atau permanen dari peralatan atau peluang penangkapan ikan;

Memastikan badan-badan keselamatan kelautan diperlengkapi dengan baik untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan operasi penyelamatan laut sehubungan dengan meningkatnya insiden topan/badai dan gelombang laut;

Mengembangkan database nelayan migran dan pekerja perikanan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka termasuk penolakan keanggotaan dalam koperasi dan serikat pekerja dan akses ke skema perlindungan sosial;

Memberikan perluasan kepada nelayan dan pekerja perikanan semua manfaat perlindungan sosial yang layak didapatkan oleh pekerja di sektor non-perikanan. Dalam konteks ini, meningkatkan kesadaran tentang skema perlindungan sosial di berbagai tingkatan yang dapat menguntungkan komunitas nelayan skala kecil;

Menjamin bahwa laki-laki, perempuan, dan anak-anak komunitas nelayan di tingkat nasional menikmati tingkat akses fasilitas pendidikan yang sama dengan warga negara lain di negara yang sama. Penguatan kapasitas perempuan di tingkat masyarakat sangat penting. Ini termasuk meningkatkan akses mereka ke program pendidikan dan pelatihan, teknologi, dan kesempatan untuk belajar dari dan terinspirasi oleh para pemimpin perempuan;

Mendokumentasikan dampak COVID-19 terhadap mata pencaharian komunitas nelayan skala kecil dan kemampuan mereka untuk pulih dan memberikan dukungan untuk bergerak menuju ketahanan yang lebih besar;

Memberikan dukungan anggaran yang memadai terutama kepada pemerintah daerah yang tidak didanai dengan baik untuk meningkatkan sanitasi, pengelolaan limbah industri dan domestik dan untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian polusi yang efektif;

Meningkatkan akses listrik komunitas nelayan dan memfasilitasi pasokan listrik ke desa-desa nelayan terpencil melalui mekanisme distribusi listrik yang inovatif;

Melindungi zona penangkapan di tingkat lokal yang membantu kegiatan pra-panen dan pasca panen serta perbaikan dan peluncuran kapal penangkap ikan skala kecil agar tidak tergeser oleh industri pariwisata untuk mendirikan resor dan hotel;

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjadi yang terdepan dalam pembangunan sosial bagi nelayan dan pekerja perikanan skala kecil;

Memperkuat kapasitas nelayan dan pekerja perikanan untuk berpartisipasi dalam merancang kebijakan dan skema perlindungan sosial, memantau kualitas layanan ini dan melaporkan kepada pihak berwenang;

Memperkuat pendaftaran terpilah menurut jenis kelamin dari semua nelayan, pekerja perikanan, dan anggota keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk menghadirkan keadilan bagi penerima manfaat dan visibilitas yang lebih besar kepada pemangku kepentingan perikanan skala kecil;

Melindungi otonomi administrasi perikanan dan mendorong mereka untuk berkoordinasi dengan instansi di bidang lain dalam masalah di luar mandat mereka;

Meningkatkan keamanan laut dengan: (i) mengurangi intrusi kapal yang lebih besar ke zona penangkapan ikan yang ditujukan untuk nelayan skala kecil; (ii) memberikan pelatihan tentang keselamatan di laut kepada nelayan skala kecil; (iii) menyediakan peralatan penyelamat jiwa pada semua nelayan skala kecil mengingat ketidakpastian

yang lebih besar di laut dari perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem dengan mengintegrasikannya dengan proses pendaftaran kapal penangkap ikan;

Pada perayaan Tahun Perikanan dan Budidaya Skala Kecil Internasional ini (IYafa 2022), kami sepenuhnya menyadari bahwa penerapan Pedoman SSF dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu pemerintah di berbagai tingkatan untuk mengatasi masalah kami dan untuk mengambil rekomendasi kami di Asia Selatan dan Tenggara.

Menerapkan Pedoman SSF, kami percaya, dapat mempromosikan keadilan dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, perlindungan hak tenurial komunitas nelayan skala kecil dan mempromosikan rezim pengelolaan yang partisipatif dan efektif, serta pencapaian pembangunan sosial anak-anak, pemuda, laki-laki dan perempuan dari komunitas nelayan dan Masyarakat Adat di wilayah pesisir dan sempadan sungai.